
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Pd.¹✉

¹Program Studi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Abstrak

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan dan revitalisasi gerakan nasional pendidikan karakter yang telah dimulai pada 2010 dan akan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kerja sama dan komitmen dari kepala sekolah, guru, dan orangtua merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. PPK diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga menjadi warga negara yang memiliki karakter kuat, mencintai bangsanya dan mampu menjawab tantangan era global. Lima nilai utama karakter bangsa dalam Gerakan PPK adalah nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Kata kunci: pembelajaran matematika, pendidikan karakter

Abstract

Strengthening Character Education (PPK) is a continuation and revitalization of the national character education movement that has begun in 2010 and will be done thoroughly and systematically at the level of primary and secondary education. The cooperation and commitment of principals, teachers, and parents is a key factor in the successful implementation of character education in schools. PPK is expected to foster the spirit of learning and optimize the potential of learners to become citizens who have strong character, love the nation and able to answer the challenges of the global era. The five main values of the nation's character in the PPK Movement are religious, nationalist, independent, mutual, and integrity.

Keywords: learning mathematics, character education

✉Alamat korespondensi:
Kampus UMK Gondangmanis, Bae Kudus Gd. L. Lt I PO. BOX 53 Kudus
Tlp (0291) 438229 Fax. (0291) 437198
E-mail: wahyudin_mat@yahoo.com.

ISBN: 978-602-1180-70-9

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang tepat, karena telah memberikan pendidikan karakter sekaligus membentuk intelektualitas berupa kompetensi (Kemendikbud RI, 2017). Meskipun demikian, proporsi penerapan pendidikan karakter dengan pendidikan intelektual belum berimbang akibat berbagai faktor. Kesadaran sekaligus usaha pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan nasional semakin kuat ketika pada tahun 2010 pemerintah Indonesia mengukuhkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dioptimalkan, diperdalam, dan bahkan diperluas sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter bangsa.

Konsep Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan dan revitalisasi gerakan nasional pendidikan karakter yang telah dimulai pada 2010. Gerakan penguatan pendidikan karakter menjadi semakin mendesak diprioritaskan disebabkan oleh berbagai persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa seperti maraknya tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengancam kebinekaan dan keutuhan NKRI, munculnya gerakan-gerakan separatis, perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan dimasyarakat, kejahatan seksual, tawuran pelajar, pergaulan bebas dan kecenderungan anak-anak muda pada narkoba.

Selain persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa, Indonesia juga menghadapi tantangan persaingan di tataran global, seperti rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia yang mengancam daya saing bangsa, lemahnya fisik anak-anak Indonesia karena kurang olah raga, rendahnya rasa seni dan estetika serta pemahaman etika yang belum terbentuk selama masa pendidikan. Berbagai alasan ini telah cukup menjadi dasar kuat untuk kembali diperkuatnya jati diri dan identitas bangsa melalui gerakan nasional pendidikan dengan meluncurkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan dengan memperhatikan asas keberlanjutan dan kesinambungan dan

menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah memberlakukan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014-2019. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, Gerakan PPK dipandang perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini **pengintegrasian** dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas disekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; **perdalam** dan **perluasan** dapat berupa penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik, penambahan dan pemajanan kegiatan belajar peserta didik, dan pengaturan ulang waktu belajar peserta didik di sekolah atau luar sekolah; kemudian **penyelerasan** dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK.

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang telah dimulai sejak tahun 2010 sudah melahirkan sekolah-sekolah rintisan yang mampu melaksanakan pembentukan karakter secara kontekstual sesuai dengan potensi lingkungan setempat. Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah diharapkan dapat memperkuat bakat, potensi dan talenta seluruh peserta didik. Banyak satuan pendidikan telah melaksanakan praktik baik (*best practice*) dalam penerapan pendidikan karakter. Dampak dari penerapan ini adalah terjadi perubahan mendasar di dalam ekosistem pendidikan dan proses pembelajaran sehingga prestasi mereka pun juga meningkat. Program PPK ingin memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang selama ini sudah dilakukan di banyak sekolah. Dalam diskusi Praktik Baik Sekolah Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 14 September 2016, Kemendikbud menemukan bahwa sebagian besar sekolah yang diundang sudah menerapkan pendidikan karakter melalui pembiasaan dengan kegiatan penumbuhan dan pembudayaan nilai-nilai karakter yang disepakati

oleh masing-masing sekolah. Kerja sama dan komitmen dari kepala sekolah, guru, dan orangtua umumnya menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di masing-masing sekolah tersebut.

Penerapan penguatan pendidikan karakter akan berjalan dengan baik jika kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan visioner. Menjadi orang yang dapat dipercaya berarti Kepala Sekolah merupakan sosok berintegritas, mampu menjadi manajer yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembentukan karakter. Visioner berarti kepala sekolah memiliki visi jauh ke depan tentang kekhasan, keunikan, dan kualitas sekolah (*schoolbranding*) yang dibangunnya. Kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggali potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan yang ada untuk mendukung program sekolah sangat diperlukan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Prinsip-Prinsip Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menurut Perpres 87/2017 didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga menjadi warga negarayang memiliki karakter kuat, mencintai bangsanya dan mampu menjawab tantangan era global. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Tujuan program PPK adalah antara lain menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan

menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsasingguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dandilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Prinsip 1 Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

Prinsip 2 Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

Prinsip 3 Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

Prinsip 4 Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.

Prinsip 5 Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat

berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

Prinsip 6 Kecakapan Abad XXI

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad ke-21, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creativethinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk juga penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

Prinsip 7 Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

Prinsip 8 Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

Prinsip 9 Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan disekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter

Pembentukan karakter bangsa dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerja sama dengan komunitas. Program Penguatan

Pendidikan Karakter diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik senang di sekolah sebagai rumah yang ramah untuk bertumbuh dan berkembang.

Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

Setiap proses pembelajaran melibatkan mata pelajaran tertentu atau tema yang sedang dilaksanakan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta pengelolaan kelas. Dalam rangkaian penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas guru memiliki kesempatan leluasa untuk mengembangkan karakter peserta didik. Guru dapat memilih bagian dari mata pelajarannya atau tema pelajaran untuk diintegrasikan dengan pengembangan karakter peserta didik. Metode belajar yang dipilih pun dapat menjadi media pengembangan karakter. Ketika mengelola kelas guruberkesempatan untuk mengembangkan karakter melalui tindakan dan tutur katanya selama proses pembelajaran berlangsung.

Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah memotret berbagai macam bentuk pembiasaan, model tata kelola sekolah, termasuk di dalamnya pengembangan peraturan dan regulasi yang mendukung PPK. Budaya sekolah yang baik diharapkan dapat mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. PPK berbasis budaya sekolah mengembangkan berbagai macam corak relasi, kegiatan dan interaksi antar individu di lingkungan sekolah yang mengatasi sekat-sekat kelas, yang membentuk ekosistem dan budaya pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Membangun budaya sekolah yang baik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dalam membangun budaya sekolah adalah 1) pembiasaan dalam kegiatan literasi; 2) kegiatan ekstrakurikuler, yang mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK, dan 3) menetapkan dan mengevaluasi tata tertib atau peraturan sekolah. Budaya sekolah yang baik dapat mengembangkan iklim akademik yang kompetitif dan kolaboratif, yang diperlukan sekolah dalam menetapkan atau memperkuat *branding* sekolah.

Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat

Berbagai studi yang terkait peran masyarakat dalam pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan (pendidikan karakter) bergantung pada kemitraan yang sinergis antara para pelaku pendidikan yakni keluarga, sekolah,

dan masyarakat. Pondasi pendidikan karakter sebagaimana digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara diletakkan oleh keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama. Namun demikian, lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilannya. Kemitraan tri sentra pendidikan yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong". Peningkatan peran komite sekolah dan keluarga dalam PPK sangat diperlukan.

Suatu Wacana Refleksi: Apa Yang Salah Dengan Pendidikan Karakter?¹

Perkembangan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 terjadi sangat pesat, mulai kurikulum 1945, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, sampai dengan 2004 dan sekarang kurikulum 2013. Di sisi lain, perkembangan pendidikan karakter di Indonesia dimulai sejak kurikulum 1964 dengan nama Pendidikan Moral dan Pancasila. Dalam kurikulum '64 itulah dikembangkan pendidikan tentang moral dan nasionalisme bangsa yang menjadi benih pendidikan karakter di Indonesia. Namun demikian, pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini tampaknya tidak lepas dari pengaruh sejumlah program pendidikan karakter yang telah lebih dahulu diberlakukan di negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat. Program pendidikan karakter yang terkemuka di Amerika Serikat antara lain adalah Character Counts yang mengangkat "The Six Pillars of Character" dan Character Education Partnership yang mengangkat "Eleven Principles of Effective Character Education" dan "Character Education Quality Standards.

Lapangan pendidikan karakter, atau *character education*, penuh kontroversi saat perdebatan mempertanyakan apakah fokus darinya seharusnya pada perbuatan-perbuatan yang dijunjung tinggi, nilai-nilai, perilaku-perilaku, atau kapasitas-kapasitas penalaran. Kontroversi telah berpusar di sekitar beragam pendekatan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter: belajar dengan pengalaman, perdebatan rekan sebaya, pengajaran indoktrinatif, pelayananan masyarakat, pengelolaan yang melibatkan partisipan,

membaca tentang karakter, dan sebagainya. Banyak dari perdebatan yang ada selama ini berakar pada berbagai perbedaan teoretis dan filosofis. Namun demikian, jika kontroversi tersebut mereda, maka barangkali jelas bahwa inti dari pendidikan karakter bukanlah perbedaan filosofis, ideologi pedagogis, politik, atau berbagai ketidakselarasan lainnya. Lebih tepatnya, pendidikan karakter adalah tentang perkembangan anak.

Kontroversi teoretis dan filosofis tersebut terutama terkait definisi karakter itu sendiri, fokus dari pendidikan karakter, dan beragam pendekatan untuk implementasinya. Misalnya, sebagai refleksi kemelut tersebut, Michael Davis (2003) dalam artikelnya "What's Wrong with Character Education" berupaya untuk merangkumkan program-program pendidikan karakter yang saat itu dominan di Amerika Serikat ke dalam: 1) pendidikan moral sederhana (esensinya, pendidikan moral Kohlbergian di dalam kelas), di mana para peserta didik belajar bagaimana berpikir melalui situasi-situasi moral untuk dapat tiba pada pertimbangan atau keputusan moral terbaik dari suatu situasi; (2) pendidikan moral *just-community* (praktek pendidikan karakter berdasarkan pandangan Dewey yang menekankan pengambilan keputusan demokratis di luar kelas), di mana para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam proses demokrasi untuk mendiskusikan semua aspek kehidupan sekolah; dan, (3) pendidikan karakter sederhana (mencoba untuk membangun karakter baik di dalam maupun di luar kelas dengan menekankan perilaku yang baik), di mana nilai-nilai tertentu telah ditetapkan sejak awal dan para peserta didik diminta untuk mempraktekannya secara berulang-ulang.

Dalam artikel tersebut, Davis menyatakan bahwa pendidikan moral sederhana hanya memiliki efek kecil pada karakter, dan bahwa *just-community* tidak memiliki efek lebih besar, dibanding pendidikan moral sederhana, meski memiliki resiko dan biaya jauh lebih tinggi. Serupa demikian, jenis pendidikan karakter yang paling dominan yaitu pendidikan karakter sederhana dipandang oleh Davis memiliki tiga kelemahan yang mengarahkan kita untuk menolaknya: kelemahan dari segi empirik (tidak adanya bukti bahwa pendidikan karakter jenis ini memang melakukan apa yang diklaimnya), kelemahan dari segi konseptual (konflik antara apa yang dimaksud dengan karakter yang baik dan cara yang diajukan oleh pendidikan karakter sederhana untuk mengajarkannya), dan kelemahan dari segi moral (kegagalan untuk

¹Davis, Michael. (2003). What's wrong with character education. *American Journal of Education*, 110(1), 32-57.

melakukan hal-hal benar untuk alasan-alasan yang benar).

Kritikan Davis berangkat dari posisi bahwa pendidikan karakter adalah sebarang upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan karakter peserta didik sedemikian hingga mereka lebih cenderung untuk melakukan apa yang sepantasnya dilakukan—bukan hanya saat ini tetapi dalam rentang waktu panjang di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi yang diyakininya, efek-efek jangka pendek bukan bagian dari karakter, dan karakter merupakan "disposisi yang tertanamkan".

Secara umum, Davis (2003) melihat bahwa kebanyakan program pendidikan karakter memperlakukan pendidikan karakter layaknya pendidikan yang bersifat fisik, dalam arti bahwa semakin seseorang mengulang kata-kata terkait karakter, maka semakin mungkin seseorang itu menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan penggunaan istilah "moral calisthenics," yang "meliputi antara lain menyimak cerita-cerita tertentu, mengulang kata-kata tertentu, melakukan sekian pengabdian kepada masyarakat yang disyaratkan, atau mematuhi aturan-aturan tertentu" untuk mendeskripsikan pendidikan karakter seperti itu, Davis mengkritik bahwa kita tidak dapat memaksa peserta didik untuk menginternalisasikan karakter yang baik melalui perulangan. Namun demikian, meski tidak ada evidensi yang kuat mendukung pendidikan karakter sederhana, pendidikan karakter seperti demikian terus berkembang digunakan di Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat kritikan-kritikan lain mengenai hal bahwa pendidikan karakter di Amerika Serikat bersifat mengurangi motivasi intrinsik, fokus pada perilaku bukan pada perkembangan moral sebenarnya, kegagalan menyoroti realitas sosioekonomi, kurangnya asesmen, kurangnya penyiapan guru, serta banyak argumen lain yang menempatkan keraguan kuat pada gerakan pendidikan karakter secara keseluruhan (Noll, 2006; Burke, et al., 2001; Rossides, 2004).

Namun demikian, pihak lain, misalnya *Character Education Partnership* (2005)², mengemukakan klaim sebaliknya bahwa terdapat banyak program pendidikan karakter yang efektif mengangkat perkembangan karakter dalam diri peserta didik. Selain itu, Battistich³

²M.W. Berkowitz, et al., *What Works in Character Education: A research driven guide for educators* (Character Education Partnership, 2005).

³Victor Battistich, *Character Education, Prevention, and Positive Youth Development*. (University of Missouri, St. Louis. Character Education Partnership. Website.)

merangkumkan sekumpulan evidensi bahwa pendidikan karakter yang berkualitas tidak saja efektif untuk mengangkat perkembangan karakter yang baik, tetapi juga merupakan pendekatan pencegahan yang menjanjikan bagi berbagai masalah dewasa ini seperti perilaku agresif dan anti sosial, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku seksual bawah umur, tindak kejahatan, prestasi akademik yang buruk, dan kegagalan dalam persekolahan.

Pembelajaran Matematika dengan Penguatan Pendidikan Karakter

Pembelajaran adalah wahana yang dirancang oleh pendidik secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran terwujud dalam interaksi belajar-mengajar yang dinamis dan diarahkan kepada pencapaian tujuan, yaitu perubahan perilaku dan pribadi peserta didik yang optimal. Perubahan yang terjadi pada peserta didik itu ditampilkan dalam karakter, sebagai perilaku yang dilandasi nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur. Setiap proses pembelajaran melibatkan mata pelajaran tertentu atau tema yang sedang dilaksanakan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta pengelolaan kelas.

Guru dapat mengintegrasikan PPK melalui pilihan metode mengajar, cara mengelola kelas selama proses KBM juga, PPK dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dalam mata pelajaran, baik dalam pendekatan tematik integratif untuk SD dan mapel untuk SMP melalui pembahasan kompetensi dasar mata pelajaran yang diajarkan secara eksplisit. Dalam rangkaian penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas, guru memiliki kesempatan luasa untuk mengembangkan karakter peserta didik. Guru dapat memilih bagian dari mata pelajaran atau tema pelajaran untuk diintegrasikan dengan pengembangan karakter peserta didik. Metode belajar yang dipilihpun dapat menjadi media pengembangan karakter. Ketika mengelola kelas guru berkesempatan untuk mengembangkan karakter melalui tindakan dan tutur katanya selama proses pembelajaran berlangsung.

Pertanyaan-Pertanyaan Reflektif dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan pembelajaran matematika dan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas:

1. Apakah guru dapat digantikan oleh teknologi?
2. Selama para guru mengajar, adakah kesempatan bagi mereka untuk

- mengintegrasikan pengembangan pendidikan karakter?
3. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan metode penguatan pendidikan karakter?
 4. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengorganisasikan peserta didik dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter?
 5. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatur kondisi fisik kelas dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter?
 6. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatur lingkungan sosial kelas dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter?

DAFTAR PUSTAKA

- Berkowitz, M.W. (1997). "The Complete Moral Person: Anatomy and Formation" dalam J.M. Dubois, (Eds.), *Moral Issues in Psychology: Personalist Contributions to Selected Problems*, 11-42. Lanham, Md.: University Press of America.
- (2002). "The Science of Character Education" dalam W. Damon, ed., *Bringing in a New Era in Character Education*, 43-63. Stanford, Cal.: Hoover Institution Press.
- Burke, Nancy, Cru, Sharon, Genzler, Mary, Shaub, Dee, & Sheets, Jayne. (2001). (ERIC Document Reproduction Service No. ED453144).
- Davis, Michael. (2003). What's wrong with character education. *American Journal of Education*, 110(1), 32-57.
- Isaacs, D. (2006). *Character Building*. Portland, OR: Four Courts Press.
- Kemdiknas. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kemendikbud RI. (2017). *Konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter di SD dan SMP*. Jakarta.
- Kohlberg, L. (1984). *The Psychology of Moral Development, Essays on Moral Development, Vol. 2*. New York: Harper and Row.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character*. New York: Bantam.
- NCTM . (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Noll, J. W. (2006). *Taking sides: clashing views on controversial educational issues* (13th ed.). Guilford, CT: Dushkin/McGraw-Hill.
- Puskur. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Rossides, Daniel W. (2004). Knee-jerk formalism: Reforming American education. *Journal of Higher Education*, 75(6), 667-704.